

Kegiatan Alat Kelengkapan DPR-RI Minggu Keempat Mei 2011

Minggu IV Mei 2011, DPR tetap berkonsentrasi pada tugasnya dalam bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran. Berikut ringkasan untuk minggu ini.

Oleh: Ketua DPR RI, Marzuki Alie

Anggaran

I. Pada Masa Sidang IV 2010-2011, DPR melakukan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012 dan Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN 2012. Untuk kegiatan ini, DPR telah mengagendakan, pada tanggal 20 Mei 2011 berlangsung Rapat Paripurna dengan acara keterangan Pemerintah mengenai Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2012 yang diawali dengan penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2012. Pada tanggal 25 Mei 2011, berlangsung Rapat Paripurna dengan acara pandangan fraksi-fraksi atas keterangan Pemerintah mengenai Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2012. Pada 31 Mei 2011, Rapat Paripurna dengan acara tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi.



II. Substansi materi yang telah disampaikan oleh Pemerintah/Kementerian Keuangan antara lain terlihat dalam tabel asumsi ekonomi makro.

III. Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2012 secara garis besar berisi 4 hal yaitu: [1] Pelaksanaan Kebijakan Fiskal Tahun 2010 dan Proyeksi Tahun 2011; [2] Perkiraan Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2012; [3] Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2012; dan [4] Resiko Fiskal.

IV. Kebijakan Pendapatan Negara tahun 2012. Penerimaan dari Perpajakan diupayakan meningkat dengan didukung langkah-langkah: [1] Perbaikan pelayanan dan penyuluhan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela; [2] Perbaikan kebijakan perpajakan untuk mendukung optimalisasi pendapatan negara dan mendukung kegiatan

NO.	ASUMSI EKONOMI MAKRO	2012
1.	Pertumbuhan Ekonomi	6,5 – 6,9 %
2.	Inflasi	3,5 – 5,5 %
3.	Suku Bunga SPN 3 Bulan	5,5 – 7,5 %
4.	Nilai Tukar Rupiah per dollar US	9.000 – 9.300
5.	Harga Minyak Indonesia US dollar per barrel	75 – 95
6.	Lifting Minyak barrel per hari	950.0– 970.000

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/be-rita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KE-TUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Helmizar **PIMPINAN REDAKSI:** Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIM-PINAN REDAKSI:** Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; **FOTOGRAFER:** Eka Hindra **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Rizka Arinindy **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

ekonomi, termasuk dengan pemberian insentif fiskal; [3] Pembinaan internal aparatur dan sistem perpajakan; [4] Penegakan hukum kepada wajib pajak yang tidak patuh; [5] Mensinergikan unsur pemerintah dalam penggalan potensi perpajakan dengan memberikan dukungan data/informasi kepada Kementerian Keuangan.

V. Kebijakan Belanja dalam tahun 2012 diharapkan mampu mendukung rencana aksi yang meliputi 3 bagian yaitu: (i) Prioritas nasional; (ii) Bidang-bidang pembangunan; (iii) Pembangunan kewilayahan. Sementara, prioritas nasional terdiri dari: [1] Reformasi birokrasi dan tata kelola; [2] Pendidikan; [3] Kesehatan; [4] Penanggulangan kemiskinan; [5] Ketahanan pangan; [6] Infrastruktur; [7] Iklim investasi dan iklim usaha; [8] Energi; [9] Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; [10] Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik, yaitu (i) bidang politik, hukum dan keamanan (ii) bidang perekonomian, serta (iii) bidang kesejahteraan rakyat.

VI. Kebijakan Pembiayaan Anggaran Tahun 2012. Arah kebijakan deficit anggaran pada tahun 2012 direncanakan sekitar 1,4-1,6% terhadap PDB, Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengendalikan defisit guna menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah dalam kerangka fiskal periode 2010-2014. Sementara, Resiko Fiskal untuk 2012 adalah sebagai potensi tambahan defisit APBN yang disebabkan oleh sesuatu diluar kendali Pemerintah. Risiko Fiskal dikelompokkan dalam empat kategori utama yaitu: (i) resiko yang berasal dari dinamika ekonomi makro (ii) resiko utang pemerintah pusat (iii) kewajiban kontinjensi pemerintah pusat (iv) desentralisasi fiskal.

Legislasi

Pada masa sidang ini, fungsi legislasi ditangani secara intens oleh Komisi, Baleg dan Pansus. Bahkan, mereka melakukan konsinyering demi penyelesaian RUU agar sesuai target waktu yang telah ditetapkan untuk selesai dalam Masa Persidangan IV. Khusus mengenai RUU Mata Uang, Komisi XI dan Pemerintah, akhirnya menyetujui untuk disahkan dalam Rapat Paripurna tanggal 31 Mei 2011. Kesepakatan yang dicapai dalam pembicaraan tingkat I adalah memastikan bahwa Menteri Keuangan ikut menandatangani dalam mata uang kertas Republik Indonesia, yang akan berlaku mulai tanggal 17 Agustus 2014. Pembubuhan tandatangan oleh Pemerintah ini berarti bahwa Pemerintah juga turut menanggung beban biaya operasional dari peredaran rupiah tanpa mengurangi kewenangan BI dibidang moneter. Wakil Ketua Komisi XI memastikan bahwa, tandatangan oleh Menkeu di uang kertas dilakukan untuk menunjukkan bahwa rupiah merupakan mata uang NKRI.

Pengawasan

Telah dilakukan Rapat Kerja/RDP Komisi-komisi dengan pasangan kerja. Komisi III telah melakukan RDP dengan KPK. Pokok-pokok pembicaraan adalah mengenai [1] roadmap pemberantasan korupsi, [2] pelaksanaan tugas dan fungsi KPK pada tahun 2010 sampai semester I tahun 2011, dan [3] penyelesaian kasus-kasus aktual. Kesimpulannya adalah Komisi III mendesak pimpinan KPK agar: [1] tugas dibidang pencegahan tindak pidana korupsi harus diberi prioritas disamping penindakan tindak pidana korupsi dengan cara memperbaiki secara simultan sistem administrasi di lembaga pemerintah/negara, regulasi dan pengelolaan keuangan negara sehingga dapat mengurangi kebocoran keuangan negara; [2] dalam waktu sisa masa jabatan 2007-2011 agar KPK menangani secara tuntas perkara tindak pidana korupsi yang menjadi perhatian masyarakat, agar secara efektif menimbulkan efek jera bagi pelaku sekaligus sebagai sarana meningkatkan pencegahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi; [3] meningkatkan koordinasi dan supervisi terhadap kepolisian dan kejaksaan dalam rangka penguatan lembaga penegak hukum tersebut dalam meningkatkan dayaguna dan hasilguna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi; [4] segera menyusun desain strategis pencegahan korupsi di DPR-RI untuk mewujudkan lembaga DPR yang kredibel dan dipercaya dimata publik dan menyampaikan hasilnya kepada komisi III dalam persidangan berikutnya.

KPK juga menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, KPK tidak mengalami hambatan dari segi peraturan perundang-undangan. KPK berpendapat bahwa



Suasana Rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI

UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah memadai sehingga tidak perlu dilakukan perubahan. Untuk RUU Tipikor, karena Indonesia sudah meratifikasi UNCAC, maka berkewajiban untuk melaksanakan pasal-pasal yang diwajibkan UNCAC yang akan dimasukkan dalam draft RUU tipikor yang saat ini dalam persiapan pembahasan.

Rapat kerja Komisi X dengan Menpora, RDP dengan Ketua Umum KONI dan Ketua Komite Normalisasi PSSI (KN PSSI), mengagendakan pembahasan mengenai Pengurus PSSI. Kesimpulan rapat, Komisi X dan Pemerintah sepakat bahwa [1] Kepengurusan PSSI (Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Exco) periode 2011-2015 harus dipilih dan ditetapkan melalui kongres PSSI yang diakui oleh FIFA, dan pelaksanaannya dimandatkan kembali kepada KN PSSI. [2] Agar kongres dapat dilaksanakan kembali, maka Komisi X mendesak pemerintah untuk mengawal dan memberikan jaminan agar pelaksanaan Kongres PSSI paska 20 Mei 2011, sesuai dengan mandat dan aturan yang dikeluarkan oleh FIFA. [3] Komisi X mendesak Pemerintah, KONI, KOI, dan KN PSSI melakukan langkah-langkah strategis kepada FIFA untuk mencegah sanksi terhadap PSSI. [4] Komisi X mendesak KN PSSI untuk mengambil langkah tegas dalam penegakan disiplin organisasi PSSI.

Komisi VII dalam RDP dengan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (DJ EBTKE), Dirut PLN, Kepala Batan dan Kepala Bapeten mengagendakan rencana pengembangan pembangkit listrik dan energi baru dan terbarukan, menyimpulkan antara lain; meminta Kementerian ESDM c.q. DJ EBTKE, mengoptimalkan upaya dalam meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi, peningkatan kandungan lokal dan industri penunjang EBTKE, Desa Mandiri Energi, dan percontohan green building, clean factory, clean industrial park, low carbon city, serta clean provinces. Untuk mempercepat pengembangan EBT se bagaimana amanat UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi, Komisi VII mendesak pemerintah perlu memikirkan pemberian dukungan fiskal dan non-fiskal diantaranya feed-in



Suasana Rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI

tariff dan renewable portfolio standard (RPS) bagi industri EBT, sekaligus dapat mendorong industri untuk mengembangkannya. Dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional dan mempercepat deversifikasi energi, pengembangan EBT perlu dipercepat. Oleh karena itu, kementerian ESDM c.q. DJ EBTKE perlu segera menyusun regulasi yang lebih implementatif.

Komisi VII juga meminta pemerintah agar melakukan penentuan tapak/site dan pemilihan teknologi dalam pembangunan PLTN sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan lebih dahulu melakukan kajian yang mendalam terkait jaminan pasokan bahan bakar uranium untuk jangka panjang, serta kajian keamanan PLTN terhadap resiko bencana alam.

Diplomasi Parlemen

Ketua DPR telah menerima delegasi senator Malaysia yang dipimpin oleh Mr. Tan Sri Abu Zahar Ujang pada 20 Mei 2011. Dalam kesempatan kunjungan ini, kedua pihak bersepakat untuk lebih membina, mengembangkan dan melakukan kerjasama parlemen kedua negara dan memberikan kemanfaatan dalam hubungan kerjasama ini. Kedua pihak memahami pentingnya peranan dan fungsi parlemen bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan Malaysia dan Indonesia dirasa semakin maju, dari waktu ke waktu terdapat saling pemahaman yang semakin baik tentang konsidi hubungan kedua negara. Banyak masalah yang harus diselesaikan oleh kedua negara: masalah TKI, masalah perbatasan darat dan laut, dan memerangi kejahatan internasional lintas batas (pencucian uang, perdagangan perempuan dan anak, narkoba dan terorisme). Kedua parlemen memiliki perhatian dan komitmen tinggi bagi pengembangan kerjasama parlemen melalui berbagai institusi seperti grup kerjasama bilateral Indonesia-malaysia dan berbagai organisasi parlemen internasional seperti APA, AIPA, IPU, dan PUIC sebagai forum parlemen.

DPR-RI telah mengirimkan delegasi grup kerjasama bilateral (GKSB) DPR-RI-Parlemen Chile pada awal Mei 2011 yang diketuai oleh Hj. Anna Mu'awanah SE, MH. Kesimpulan dari kunjungan delegasi GKSB tersebut antara lain adalah; dari beberapa pertemuan resmi, baik pertemuan dengan Menlu Chile, Parlemen dan KADIN, isu yang paling menonjol adalah Free Trade Agreement (FTA). Sebagai negara yang mengandalkan ekonominya melalui perdagangan internasional, Chile banyak melakukan FTA dengan banyak negara. Bahkan dengan beberapa negara ASEAN, seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam, akan segera ditandatangani. FTA dengan Indonesia, diharapkan juga dapat direalisasikan. Menurut catatan, pihak Indonesia masih melakukan konsolidasi sebelum melakukan perjanjian dengan Chile. Delegasi memberikan rekomendasi kepada Pemerintah RI c.q. Kementerian Perdagangan dan KADIN untuk meniadakan keinginan Chile untuk bekerjasama dengan Indonesia dalam FTA.*

Anis Matta Sambut Baik Kerjasama Pelatihan Auditor Indonesia-Vietnam

“Kerjasama pelatihan audit yang akan dilakukan antara BPK RI dan BPK Vietnam akan menambah hubungan baik antara kedua Negara,” kata Anis Matta saat menerima Ketua Auditor General of State Audit Office Of Vietnam Young Dinh Hue, Rabu, (25/5), di Gedung DPR RI.

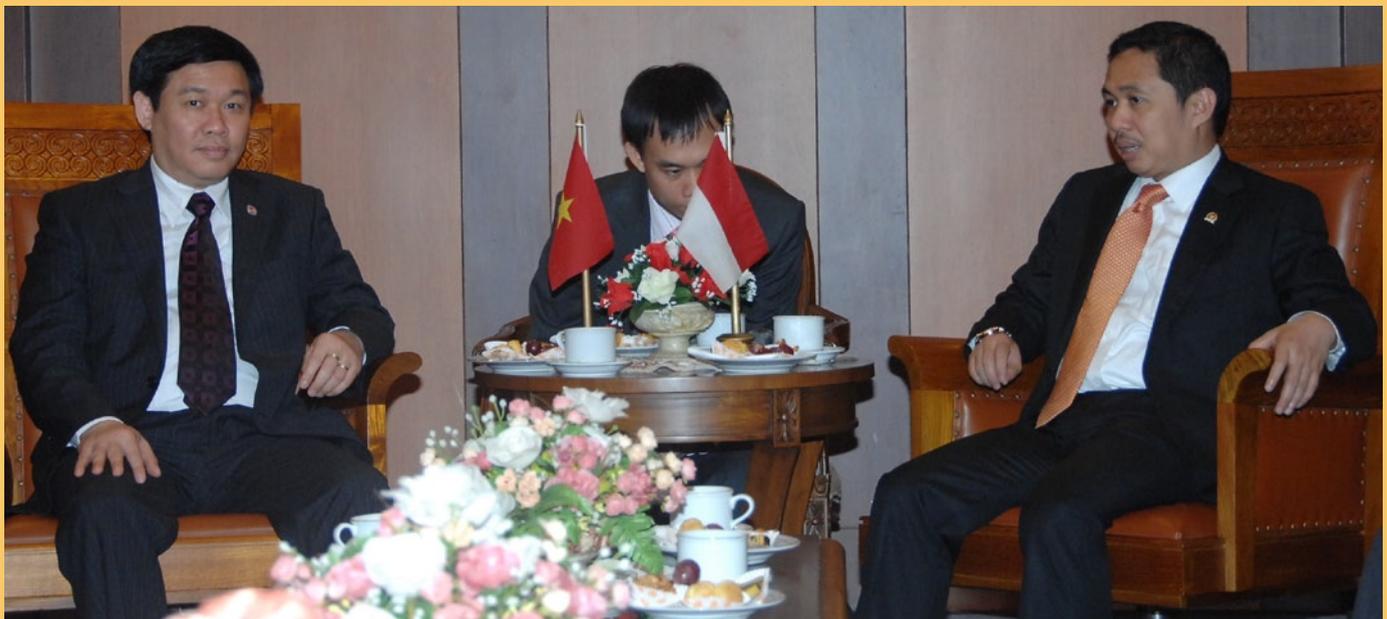
Menurut Young Dinh Hue, Badan Pemeriksa Keuangan RI telah mempunyai banyak pengalaman dalam melakukan audit terhadap keuangan Negara. “Auditor General of State Audit Office Of Vietnam sangat bangga untuk melakukan kerjasama pelatihan audit keuangan dengan BPK RI,” katanya.

Untuk itu, Auditor General of State Audit Office Of Vietnam telah juga melakukan pembicaraan yang intensif dengan ketua BPK RI Hadi Peornomo mengenai kerjasama tersebut. (as) foto:As

Wakil Ketua DPR RI Anis Matta mendukung rencana kerjasama pelatihan audit keuangan Negara yang akan dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Vietnam.



Wakil Ketua DPR RI Anis Matta saat menerima Auditor General of State Audit Office of Vietnam



Wakil Ketua DPR RI Anis Matta saat menerima ketua Auditor General of State Audit Office of Vietnam Young Dinh Hue

Keluarga Miskin Minahasa Selatan Terima Bantuan PKH Senilai Rp 4,7 Miliar

Sebanyak 3.718 kepala keluarga (KK) dari delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan menerima dana bantuan Peserta Keluarga Harapan (PKH) senilai total Rp 4,7 miliar.



Bantuan tunai dari Kementerian Sosial ini diserahkan langsung oleh Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Kadir Karding kepada perwakilan PKH di Kabupaten Minahasa Selatan, hari ini (Rabu, 27/7).

Abdul Kadir Karding mengharapkan dana bantuan tunia tersebut bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Karena bantuan itu bertujuan meningkatkan taraf kesehatan dan pendidikan masyarakat sangat miskin. Untuk diketahui, tercatat 9874 kepala keluarga sangat miskin (RTSM) tersebar di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan.

Abdul menjelaskan, besaran bantuan PKH yang diberikan pada ibu RTSM beragam. Tergantung kondisi keluarga dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan PKH. Setiap RTSM bisa mendapat dana PKH sampai Rp 2,2 juta pertahun. Ada pula yang Rp 600 ribu pertahun. Secara terperinci, ibu rumah tangga penerima PKH mendapat bantuan tetap pertahun

sebesar Rp 200 ribu. Kemudian jika mempunyai anak yang menempuh pendidikan SD/MI ditambah sebesar Rp 400 ribu. Sementara untuk pendidikan SMP/MTs senilai Rp 800 ribu dan bantuan kesejatan ibu hamil/nifas atau balita sebesar Rp 800 ribu per tahunnya

Dalam kesempatan itu, Karding bersama delapan anggota Komisi VIII DPR lainnya juga menyerahkan bantuan tunai bagi warga yang mengalami cacat mental tetap dan lanjut usia. Disamping menyalurkan bantuan uang tunai sebesar Rp 900 juta kepada 30 Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Masing-masing kelompok mendapat Rp 30 juta.

Lebih lanjut, Karding mengatakan, dengan disahkan UU Penanganan Fakir Miskin di Paripurna DPR pekan lalu, diharapkan pemerintah di masa mendatang lebih memperhatikan masyarakat miskin.

“Bukan hanya dengan program charity, yang setelah dibagikan akan habis

dan masyarakat tetap miskin. Namun dengan memberdayakan dan membantu masyarakat dengan program bantuan usaha,” ujar Karding dalam sambutannya.

Menurut dia, mayoritas masyarakat miskin bukan lantaran malas, tapi keadaan dan kebijakan yang kurang memberi ruang bagi mereka untuk berusaha. Karenanya, melalui pembentukan KUBE diharapkan dapat menjadi pemecah kebuntuan masalah pengentasan kemiskinan selama ini.

Kunjungan kerja Komisi VIII DPR ini diterima langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, MC Kairupan di kantor Bupati Minahasa Selatan. Delapan anggota Komisi VIII DPR yang ikut mendampingi Karding, yakni Adji Farida Padmo, Yetty Heryati, Kasma Bouty, Muhammad Lutfi, Ina Ammania, Rukmini Buchori, Achmad Rubaie dan Muhammad Lufty. (Rd)

DPR Beri Perhatian Hilangnya Manuskrip Bernilai Tinggi Aceh

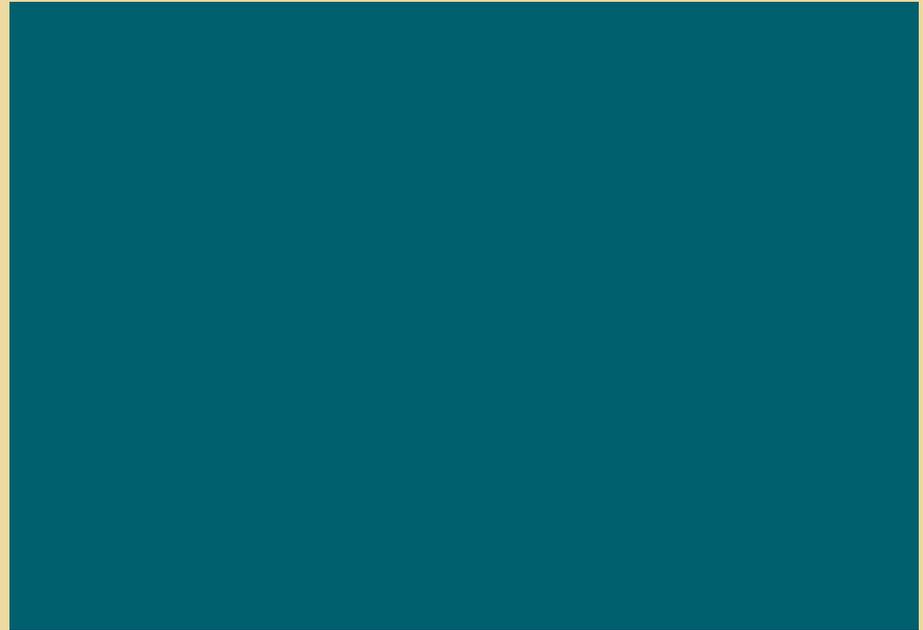
“Manuskrip yang sudah pindah tangan ini sulit, apalagi dikuasai negara lain. Sebenarnya kita sudah mempunyai UU Cagar Budaya untuk memagari kekayaan budaya kita seperti manuskrip, situs, dan lain-lain. Tapi untuk mendapatkan kembali 5000 manuskrip yang dikuasai Malaysia dan ratusan di Brunai itu sulit, tetapi paling tidak langkah kita kedepan jangan sampai kejadian ini terulang,” kata Ketua Tim Kunker Komisi X di NAD, Utut Adianto.

Dalam penjelasannya Wakil Gubernur Aceh menyebut sejarah mencatat Negeri Serambi Mekah ini dahulu adalah kerajaan besar yang memperhatikan intelektualitas, termasuk karya dalam bentuk tulisan seperti kitab kuno tentang ilmu agama, medika, seni perang serta politik. “Kita kecolongan di bidang kebudayaan, 5000 manuskrip Aceh hilang, baik dibeli atau dicuri oleh Malaysia. Mereka beli dengan harga mahal, pemerintah kurang memperhatikan hal ini. Bagi saya manuskrip lebih penting dari apapun, karena ini peradaban,” tandasnya.

M. Nazar menyebut Malaysia saat ini sedang membangun pusat manuskrip terbesar di Asia, koleksinya mayoritas berasal dari Aceh. Pada abad ke 15-19 beberapa bagian Malaysia, seperti Perak, Johor, Pahang dibawah pengendalian Aceh. Kondisi ini berubah setelah penjajah Belanda datang. Ia menyadari untuk mengembalikan kembali kekayaan budaya ini sulit, namun potensi negeri rencong ini untuk menjual wisata sejarah tentu akan berkurang. “Kita bisa contoh turki yang sukses mengkapitalkan sejarah, menjualnya kepada para turis. Kita belum berhasil lakukan di Indonesia yang cenderung hanya jual Bali,” ujarnya.

Di Aceh, pada abad 16–17 terdapat cukup banyak penulis manuskrip. Misalnya, Hamzah Fansuri, yang dikenal sebagai tokoh sufi ternama pada

Keperihatinan mengemuka ketika Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi X DPR RI mendapat laporan telah dikuasainya ribuan manuskrip Aceh oleh negara tetangga Malaysia dan Brunai Darussalam. Wakil Gubernur Provinsi Nangro Aceh Darussalam M. Nazar menyampaikan hal ini dalam pertemuan di Kantor Gubernur NAD di Aceh, Selasa (26/7/2011).



masanya. Kemudian ada Syekh Nuruddin ar-Raniri alias Syeikh Nuruddin Muhammad ibnu ‘Ali ibnu Hasanji ibnu Muhammad Hamid ar-Raniri al-Quraisyi. Ia dikenal sebagai ulama yang juga bertugas menjadi Qadhi al-Malik al-Adil dan Mufti Muaddam di Kesultanan Aceh pada kepemimpinan Sultan Iskandar Tsani abad 16. Salah satu karyanya yang terkenal berjudul “Bustanul Salatin”.

Anggota Komisi X dari Fraksi PKS Raihan Iskandar mengatakan UU Cagar Budaya yang baru saja diselesaikan DPR beranjak dari kekhawatiran banyaknya benda-benda cagar budaya seperti manuskrip dibeli oleh pihak luar. Bahkan ketika tsunami menghancurkan gedung arsip Aceh di Blang Padang, ia mendapat masukan beberapa benda bernilai sejarah tinggi hilang, kemudian diperdagangkan.

“Kita berharap pemerintah di daerah lebih pro aktif tidak cuma melakukan keluh kesah atau menanti dana mengalir dari atas. Dalam UU ada ancaman kalau pemerintah tidak peduli cagar budaya kena sanksi,” kata politisi dari dapil NAD tersebut. Ia meminta aparat pemerintah segera menuntaskan proses registrasi nasional terhadap seluruh benda cagar budaya di seluruh tanah air, sebagaimana diamanatkan undang undang. Apabila telah terdata, kasus hilangnya manuskrip Aceh bisa diatasi karena memiliki bukti kepemilikan.

Pendidikan Aceh Bangkit Pasca Tsunami

Sementara itu anggota Komisi X Itet Tridjajati Sumarijanto memberikan apresiasi pada jajaran pendidikan di Aceh yang telah berhasil bangkit setelah bencana tsunami. “Catatan

yang saya miliki bencana yang menarik perhatian dunia itu telah merusak 2000 sekolah, 2500 guru meninggal. Pada kunjungan kedua saya ke Aceh pasca tsunami, saya lihat pembangunan yang didukung masyarakat internasional tersebut sangat fantastis perkembangannya,” ujarnya.

Ia meminta segenap pihak di Aceh dapat mempertahankan capaian ini sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat dunia yang telah banyak membantu. Politisi PDIP ini berharap peran para guru dapat dioptimalkan dalam proses kebangkitan Aceh. Para guru menurutnya perlu ditingkatkan kapasitasnya dengan diberi peluang mempelajari pendidikan di negara lain untuk membuka pemahaman terhadap beragam permasalahan pendidikan.

Anggota Komisi X dari Fraksi Gerindra Nuroji meminta pemerintah provinsi Aceh lebih banyak membangun SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Baginya langkah ini dapat jadi solusi bagi masyarakat terutama generasi muda untuk segera memasuki lapangan pekerjaan. “SMK bisa dibangun lebih banyak, bagi saya ini dapat segera mendukung rakyat Aceh.”

Wakil Gubernur Aceh, M. Nazar mengatakan pendidikan merupakan prioritas sehingga kebijakan anggaran sudah mencapai 20 persen. Peran penting sekolah kejuruan dalam menyiapkan tenaga kerja siap pakai membuat pilihan membangun sekolah kejuruan menjadi pilihan. Bekerja sama dengan Jerman yang dinilai berpengalaman, telah dibangun beberapa SMK baru. “Jerman kita pilih karena disana 80 persen sekolah menengah mereka adalah SMK.”

Data pemerintah menunjukkan provinsi terbanyak yang mengirim mahasiswa untuk belajar di Timur Tengah adalah provinsi Aceh, tidak kurang dari 500 mahasiswa. Disana menurut wagub mereka tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga disiplin ilmu lain seperti tehnik. Untuk mendukung anak yatim yang kehilangan orang tua pada saat bencana tsunami, pemprov juga telah menyiapkan beasiswa untuk 80 ribu anak senilai 1,8 juta rupiah pertahun. Wagub menyebut program ini sebagai terobosan. (iky)

DPR Tekankan Tujuh Program Renstra DPR

Wakil Ketua BURT Pius Lustrilanang mengatakan, DPR mendorong 7 program agenda prioritas diantaranya, penguatan kelembagaan DPR dengan membentuk badan Fungsional Keahlian.



Kemudian, dari sisi unit pengawasan internal. Perlu didorong penguatan pengawasan internal, dengan membentuk unit pengawasan internal yang bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI melalui BURT dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekjen DPR RI.

“Selama ini pengawasan internal hanya eselon III artinya bagaimana mengawasi Sekjen yang notabene eselon I, karena itu perlu ditingkatkan sejenis Inspektorat Jenderal,”paparnya saat menyampaikan pidatonya dihadapan peserta parlemen remaja 2011 di Kopo, baru-baru ini.

Kemudian reformasi kesekjen mencakup kelembagaan, tata laksana dan sumber daya manusia. Prioritas pencapaian diantaranya penguatan kehumasan DPR RI yaitu membangun sistem kehumasan yang terintegrasi dan terkoordinasi sehingga menghindari munculnya kesalahpahaman.

Dia menambahkan, perlu adanya kemandirian pengelolaan anggaran DPR RI. Serta mendorong upaya penguatan lembaga negara melalui kemandirian pengelolaan, termasuk anggaran.

Pengembangan prasarana utama, lanjut Pius, diantaranya membangun kondisi prasarana utama yang saat ini tidak memadai dan melebihi kapasitas. “Kemudian Perpustakaan Parlemen diantaranya membangun perpustakaan yang memadai,”tambahnya.

Penguatan sarana representasi, jelasnya, membentuk rumah aspirasi yang terkait tugas-tugas anggota dewan dalam merepresentasikan konstituen yang diwakilinya.

Terakhir yaitu, mengembangkan E-parliament, berusaha membangun sistem komunikasi berbasis ICT sebagai perangkat penting penyediaan akses informasi bagi anggota dan masyarakat. (si)/foto:iw/parle.

Ketua DPR Terima Dubes Serbia

Ketua DPR Marzuki Alie menerima kedatangan Duta Besar Serbia Zoran Kazazovic di Ruang Kerjanya, Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Selasa (26/7)

Dalam pertemuan tersebut, Dubes Serbia Zoran Kazazovic menjelaskan bahwa kedatangannya kali ini, dalam rangka mengakhiri masa tugasnya sebagai Dubes di Indonesia yang telah ia jabat selama 6 tahun 7 bulan.

“Saya merasa terhormat dapat bertemu dengan Ketua DPR, dan sesungguhnya saya pun merasa sedih, karena hari ini adalah hari perpisahan dan terakhir saya sebagai Dubes di Indonesia, jabatannya saya kali ini, merupakan tugas terpanjang yakni selama 6 tahun 7 bulan,” kata Zoran

Lebih lanjut ia menambahkan, bahwa meski sedih akan meninggalkan Indonesia, dirinya merasa puas, atas apa yang telah kedua negara capai secara bersama-sama, dan dalam berbagai hubungan kerjasama, ia berharap hubungan yang telah terjalin baik ini, dapat terus terjaga hingga kedepannya.

“Saya meninggalkan Indonesia dengan perasaan puas, karena banyak hal yang telah kita capai dalam hubungan bilateral antar kedua negara ini, dan dapat memeliharanya,” tegasnya.

Ia menambahkan, salah satu hubungan terpenting yang harus tetap dijaga adalah membangun kerjasama ekonomi antar kedua negara.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR Marzuki Alie, memberi ucapan selamat bahwa kepada Dubes Serbia yang telah berhasil membawa misinya dalam rangka terciptanya peningkatan hubungan bilateral didalam berbagai aspek. dan diharapkan dapat kembali berkunjung ke Indonesia.

“Memang kerjasama dalam bidang Politik merupakan basis dalam bidang kerjasama lainnya, namun yang paling penting, adalah bagaimana hubungan ekonomi diantara kedua negara dapat terus tumbuh dan berkembang,



Ketua DPR RI Marzuki Alie (kiri) saat menerima penghargaan Sumsel Business Award



serta memberikan kontribusi demi kesejahteraan rakyat di kedua negara,” jelas Marzuki Alie.

Marzuki yakin, dimana sebelumnya telah Menlu kedua negara telah melakukan pertemuan, dapat menimbulkan kesepahaman dari kedua negara dalam menyelesaikan segala

masalah, juga dalam meningkatkan hubungan antar kedua negara yakni Indonesia dan Serbia.

Diakhir pertemuan, Ketua DPR berterima kasih atas kedatangan Dubes Serbia untuk berpamitan dan diharapkan dapat kembali lagi mengunjungi Indonesia.(nt)/foto:iw/parle.

Komisi VIII DPR Meminta Anggaran Sosial Perusahaan digunakan untuk Program Pengentasan Kemiskinan

Tim Kunjungan Komisi VIII DPR yang berkunjung ke Provinsi Banten meminta agar perusahaan-perusahaan yang terdapat di Cilegon, Serang dan sekitarnya, mau mengarahkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau anggaran tanggungjawab sosial perusahaan mereka untuk program pengentasan kemiskinan, terutama di daerah sekitar perusahaan itu berada.

Hal itu mengemuka saat Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII melakukan pertemuan dengan Direksi PT. Krakatau Steel Tbk. dan PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk yang berlangsung di ruang pertemuan Hotel Permata Krakatau Cilegon kemarin (25/7).

Pimpinan rombongan Komisi VIII DPR RI, Zulkarnaen Djabar (F-PG) mengatakan, DPR baru saja mengesahkan UU tentang Penanganan Fakir Miskin. UU ini merupakan amanat konstitusi UUD 1945 pasal 34 di mana dinyatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. "UU mewajibkan seluruh pihak tidak hanya pemerintah, masyarakat juga pengusaha untuk bertanggungjawab menuntaskan kemiskinan," ujarnya menjelaskan.

Zulkarnaen memaparkan, Dari berbagai data yang telah dikumpulkan tim Panja, ada sekitar 17 juta rumah tangga sasaran (RTS) atau sekitar 50 juta jiwa yang tergolong miskin (Poor), yakni mereka yang punya penghasilan, tetapi penghasilan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara yang sangat miskin (very poor) ada 3,5 juta RTS atau sekitar 10 juta jiwa yang membutuhkan perhatian ekstra. Pelaksanaan CSR hingga saat ini belum diatur den-

gan UU. Dengan telah disahkannya UU tentang Penangan Fakir Miskin ini dirinya berharap ke depan dana CSR bisa lebih tepat sasaran dan jelas penggunaannya. "Jika dana CSR perusahaan-perusahaan di prov. Banten ini dikumpulkan, saya yakin tidak akan ada lagi orang miskin di Banten," tegasnya.

Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Fazwar Bujang dalam presentasinya mengungkapkan, PT. KS mempunyai kapasitas produksi 2,7 juta ton baja lembaran canai panas dan dingin, serta wire rod, dengan total penjualan mencapai 1,8-2 milyar dollar Amerika. Fazwar menginformasikan, perusahaannya pada tahun 2010 telah mengeluarkan dana CSR 21 milyar rupiah, dengan Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL) ke depan direncanakan akan ditambah. Sementara Vice President PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk Suhad Miyarso memaparkan, perusahaannya telah mengeluarkan sekitar 10 milyar rupiah untuk CSR, dengan target utama meningkatkan kualitas SDM yang berlangsung sejak tahun 1995. Suhad menjelaskan program CSR diantaranya berupa pemberian susu dan makanan tambahan bagi 2000 balita di 19 kecamatan di Cilegon, Serang dan sekitarnya. "Jika balitanya sehat, niscaya anak-anak mudanya akan menjadi sehat," jelasnya.

Usai melakukan pertemuan dilakukan peninjauan lapangan ke kawasan pabrik PT. Krakatau Steel Tbk. dan PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk. Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke prov. Banten dipimpin oleh Hj. Chairun Nisa (Wakil Ketua/F-PG), dengan anggota : Hj. Nani Sulistyani Herawati (F-PD), H. Zulkarnanen Djabar (F-PG), H. Humaedi (F-PG), Hj. Herlini Amran (F-PKS), H. Abdul Rozaq Rais (F-PAN), H. Endang Sukendar (F-PPP), dan Saifudin Donodjojo (F-Gerindra. (Rn,Tvp)



Baleg Terima Mahasiswa Pasca Sarjana UGM

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Kunjungan mahasiswa tersebut untuk mendapatkan penjelasan mekanisme pembentukan Undang-undang di DPR yang merupakan salah satu fungsi Dewan.



Wakil Ketua Baleg Dimiyati Natakusumah

Puluhan mahasiswa Pasca Sarjana UGM tersebut diterima Ketua Baleg Ignatius Mulyono dan Wakil Ketua Baleg Dimiyati Natakusumah, Rabu (25/5) di ruang rapat Baleg DPR.

Dalam kunjungan tersebut mahasiswa pasca sarjana UGM banyak menyoroti kinerja legislasi yang belum dapat mencapai target. Tahun 2010 RUU yang berhasil disahkan DPR hanya 16 RUU dari 58 RUU yang telah ditetapkan dan 5 (lima) RUU Kumulatif Terbuka.

Para mahasiswa pasca sarjana itu juga menyoroti banyaknya RUU yang ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional, tetapi tidak sebanding dengan hasil yang telah dicapai. Bahkan, ada beberapa RUU dibahas dalam jangka waktu yang sangat lama. Beberapa RUU telah diprogramkan di tahun 2010, namun belum berhasil dituntaskan, akhirnya diluncurkan lagi pembahasannya di tahun 2011.

Pada kesempatan tersebut, maha-

siswa pasca sarjana UGM ini berharap, DPR dan Pemerintah dapat bekerjasama untuk menuntaskan setiap UU dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat.

Ketua Baleg DPR Ignatius Mulyono mengatakan sejak amandemen UUD 1945 ada pergeseran kekuasaan legislasi dari Presiden kepada DPR. Seperti tercantum dalam Perubahan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945 membawa perubahan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu perubahan kekuasaan membentuk UU dari Presiden kepada DPR.

Adanya perubahan pemegang kekuasaan membentuk UU tersebut secara normatif menghendaki agar DPR memiliki struktur kelembagaan yang bersifat tetap, untuk itu tahun 1999 DPR RI membentuk Badan Legislasi.

Mulyono menjelaskan, Rancangan Undang-undang yang diajukan dapat berasal dari DPR, Presiden atau

DPD. Dia juga menjelaskan bahwa penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) antara DPR dan Presiden dikoordinasikan oleh Baleg.

Baleg dalam menyusun Prolegnas di lingkungan DPR dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, DPD dan/atau masyarakat. Usulan yang disampaikan secara tertulis tersebut dengan menyebutkan judul rancangan undang-undang disertai dengan alasan yang memuat urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur dan jangkauan serta arah pengaturan.

Untuk memperkuat kinerja Baleg, kata Mulyono, sekarang ini diperkuat 20 tenaga ahli dan dari Pusat Penelitian dan Pengkajian Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.

Namun jumlah ini menurut Mulyono masih kurang, karena Baleg ingin mempunyai kekuatan yang lebih besar lagi dengan membentuk kelompok pakar.

Ke depan Baleg juga berkeinginan untuk membentuk Pusat Legislasi yang bertugas untuk mengevaluasi UU mana yang masih tetap berlaku dan UU mana yang seharusnya sudah dihapus.

Menurut Mulyono, sebuah undang-undang dapat dikatakan berkualitas jika UU tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan UU itu sebagai pedoman yang akan dipakai Pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya.

Sementara Wakil Ketua Baleg Dimiyati Natakusumah menambahkan, awalnya saat menyusun Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 Dewan terlalu bersemangat, padahal saat itu baru tahun pertama DPR memulai tugasnya dan semuanya masih baru tahap

memulai sehingga belum tune in.

Sekarang sudah memasuki tahun ke dua Dewan bertugas dan semua sudah berjalan dengan baik. “Prolegnas RUU Prioritas 2011 ini kami berharap berhasil mencapai target,” kata Dimiyati.

Memang, katanya, untuk memenuhi target seratus persen tidak mungkin. Karena tidaklah mudah

membahas sebuah Undang-undang itu, termasuk sulitnya untuk membuat kesepakatan yang bulat.

“Kalau ada satu pasal, bahkan satu ayat saja Pemerintah keberatan, maka RUU tersebut tidak mungkin dapat berjalan,” katanya. Karena sebuah UU tersebut harus disetujui DPR dan Presiden.

Dimiyati mengatakan, dalam hal

ini sistem harus dibenahi, kita harus membuat sistem yang bagus. Menurutny, anggota DPR yang duduk di Badan Legislasi sekarang ini merupakan wakil-wakil dari fraksi yang memiliki kemampuan, tertib, teliti dan tahu keinginan masyarakat. Karena itu, dia optimis target Prolegnas Prioritas 2011 akan semakin banyak yang dapat diselesaikan. (tt)foto:doc parle

DPR Dukung Peningkatan Hubungan P to P dengan Malaysia

Demikian pendapat Ketua DPR Marzuki Alie saat menerima delegasi Senator dewan negara Malaysia Tan Sri Abu Zahar Ujang, di Gedung DPR, Selasa, (24/5).

“Kita semua Sepakat hubungan Indonesia dengan Malaysia sebagai sebagai warga yang serumpun harus ditingkatkan, bahkan banyak pejabat Malaysia yang berasal dari Indonesia apakah dari Sumsel, Sulawesi, Ini menjadi modal kuat dalam membangun hubungan lebih baik apakah government to government, Parlemen to Parlemen maupun people to People,” jelas Ketua DPR Marzuki Alie.

Menurutnya, hubungan ekonomi sudah semakin membaik bahkan investasi Malaysia ke Indonesia cukup besar terutama sektor perkebunan, Khusus budaya juga harus ada saling kesepahaman antar kedua negara.

Dalam bidang pendidikan, jelasnya, anak-anak Indonesia yang sekolah di Malaysia juga cukup besar sekitar 13 ribu, sementara Malaysia sekitar 6000 orang. “Mengenai tenaga kerja, sudah ada kesepahaman persoalan tenaga kerja Indonesia yang beker-

Ketua DPR Marzuki Alie mendukung peningkatan hubungan People to People (P to P) dengan Malaysia. Pasalnya, akhir-akhir ini hubungan kedua negara mengalami pasang surut.

ja di Malaysia karena itu dengan modal kuat maka tidak ada persoalan yang tidak dapat dipecahkan,”paparnya.

Ketua Senator Dewan Negara Malaysia Tan Sri Abu Zahar Ujang mengatakan, kunjungannya ke Indonesia dalam rangka mempererat silaturahmi antara kedua negara. “Persamaan budaya, agama dengan Indonesia menambah kedekatan kedua ne-

gara bahkan kerjasama G to G sudah bagus,”jelasnya.

Dia mendukung peningkatan hubungan kedua negara dalam semua aspek seperti agama ekonomi, MAUPUN budaya. “Kita mengharapkan kehadiran ini dapat berguna bagi kedua negara antara Malaysia dan Indonesia,”terangnya. (si)/foto:iw/parle.



Ketua DPR RI Marzuki Alie (kanan) saat menerima Delegasi Senator Dewan Negara Malaysia Tan Sri Abu Zahar Ujang

Para Pemimpin Lembaga Negara Sepakat untuk Merevitalisasi Pancasila

Hal itu mengemuka saat diskusi yang berlangsung di gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu malam (25/5). Diskusi menghadirkan pembicara, Ketua MPR RI Taufik Kiemas, Ketua DPR RI Marzuki Alie, Ketua DPD RI Irman Gusman, Menkopolkam Djoko Suyanto, dan Ketua MK RI Mahfud MD selaku tuan rumah.

gai prosedural dan tidak mengandung hikmah kebijaksanaan, serta munculnya sikap in-toleran di kalangan masyarakat,” ungkap Mahfud menjelaskan.

Mahfud mengungkapkan, para pemimpin lembaga negara telah bersepakat untuk segera melakukan upaya revitalisasi pancasila dan mengembalikan roh pancasila ke dalam kehidupan bangsa Indonesia, dengan melakukan langkah-langkah TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif).

Ketua MPR RI Taufik Kiemas mengatakan, menurut UU No. 27 Tahun

sebagai jatidiri bangsa harus dikembalikan kepada khittohnya.

Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan, nilai-nilai luhur pancasila yang merupakan nilai dasar bangsa Indonesia dirasa mulai luntur akhir-akhir ini. Sependapat dengan Ketua MK, Marzuki mengatakan bahwa langkah-langkah revitalisasi pancasila harus terstruktur, sistematis, dan masif. Untuk melaksanakan revitalisasi pancasila, para pemimpin lembaga negara mengusulkan pembentukan institusi baru berupa badan atau lembaga yang independen. “Tetapi kita tidak ingin lembaga itu seperti jaman orde baru dulu (BP7) yang sangat tertutup,” tegas Ketua DPR. Marzuki berpendapat, pada masa orde baru pancasila menjadi sesuatu yang sangat sakral, tidak dinamis, dan menutup ruang dialog.

Terkait fungsi DPR, Marzuki memaparkan, dalam setiap proses legislasi, budgeting (anggaran), dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPR harus mengandung nilai-nilai pancasila, dan mengedepankan asas keadilan bagi kepentingan rakyat Indonesia. Jika semua anggota DPR mempraktekkan nilai-nilai pancasila, terutama sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa pasti akan menghasilkan output yang baik. “Siapa pun yang menjalankan agamanya dengan baik, pasti akan amanah dan bekerja dengan baik,” tegas Marzuki.

Diskusi yang ditayangkan secara langsung oleh stasiun TV swasta ini dihadiri menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh, para Hakim Konstitusi, Sekjen MK RI, dan beberapa pejabat eselon pada lembaga-lembaga negara. Di sela-sela diskusi, Penyair senior Taufik Ismail sempat membacakan puisinya yang berjudul “Sekarang kita teringat pancasila”. (Rn.Tvp) foto:parle



Diskusi di gedung Mahkamah Konstitusi menghadirkan pembicara, Ketua MPR RI Taufik Kiemas, Ketua DPR RI Marzuki Alie, Ketua DPD RI Irman Gusman, Menkopolkam Djoko Suyanto, dan Ketua MK RI Mahfud MD selaku tuan rumah.

Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, pada pertemuan para pemimpin lembaga negara Selasa 24 Mei 2011 yang lalu di gedung MK, para pemimpin lembaga negara mengemukakan keresahannya, karena menangkap gejala semakin mudarnya roh pancasila dalam kehidupan sehari-hari. “Banyak sekali kekerasan horizontal di masyarakat, munculnya radikalisme, bahkan demokrasi sekarang hanya diartikan seba-

2009, MPR ditugaskan untuk melakukan sosialisasi terhadap 4 pilar bangsa, yakni pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi dalam perjalanannya, 692 orang anggota MPR kewalahan jika harus menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang luas ini. “Saat bertemu presiden saya ungkapkan, MPR tidak mampu jalan sendiri, dan saya minta pemerintah agar dapat membantu,” ujar Taufik. Ketua MPR menambahkan pancasila

Pengaduan Online Percepat Penyampaian Aspirasi Masyarakat

Sekjen DPR Nining Indra Saleh mengatakan, paska perubahan UUD 45 Amandemen, DPR mengalami perubahan yang cepat terutama tingginya aktifitas kegiatan DPR RI.

Hal tersebut, paparnya, membuat Sekretariat Jenderal dituntut sebaik mungkin untuk memenuhi tuntutan masyarakat termasuk penyerapan aspirasi masyarakat dan pelayanan informasi

Selama ini masyarakat mengantar pengaduan melalui pos dan diantar langsung oleh mereka. "Cara tersebut memiliki keterbatasan diantaranya kendala waktu dan masyarakat sulit mengetahui tindak lanjut suratnya tersebut," paparnya. Saat launching website Layanan Informasi Publik, sms pengaduan maupun websitenya, di Gedung Operation Room, Senin, (23/5)..

Dengan disusunnya sistem aspirasi informasi aspirasi masyarakat, lanjutnya, masyarakat dapat mengirim dan mengecek secara online sehingga setjen DPR dapat mengetahui data statistik surat tersebut.

"Dari Januari-20 mei terdapat 539 surat pengaduan masyarakat kepada DPR RI, melalui layanan website tersebut, masyarakat dapat melihat menu item mengirim, lihat status data pengaduan, alamat ruang lingkup, alat kelengkapan, dan alur prosesnya sejauhmana surat pengaduan mereka," jelasnya.

Dia menambah-

kan, sms aspirasi dapat mempermudah masyarakat sebagai media komunikasi antara masyarakat kepada DPR

Terkait layanan informasi publik, terangnya, hal tersebut merupakan amanat UU KIP dalam rangka memberikan informasi publik sehingga masyarakat dapat melihat secara online prosesnya, tata cara, status permohonan dan dapat segera direspons oleh pejabat PPID sesuai amanat UU yang berlaku.

Terdapat 83 permintaan informasi diantaranya risalah, pembahasan UU,

draft awal RUU, DIPA DPR, laporan pertanggung jawaban studi banding, dan agenda persidangan

Pemohon diantaranya mahasiswa, LSM, media massa dan sebagainya. "kita senantiasa mengedepankan kecepatan dan kesederhanaan penyampaian informasi untuk masyarakat," jelasnya.

Sebagai informasi, kecepatan internet 100 mbps sehingga diharapkan dengan kemampuan ini dapat memberikan pelayanan publik secara online. "Media interaksi ini akan terus disempurnakan sesuai tugas dan fungsi dewan yang semakin berat kedepannya," paparnya. (si)/foto:iw/parle.



Sekjen DPR RI Nining Indra Saleh

Partisipasi Delegasi DPR-RI ke G-20 Speakers Consultation, di Seoul Korea Selatan, 18-20 Mei 2011

G-20 Speakers' Consultation telah diselenggarakan pada tanggal 18-20 Mei 2011 di Gedung Parlemen Korea Selatan. Sidang ini merupakan yang kedua kalinya setelah sidang pertama yang telah dilaksanakan di Ottawa – Kanada tahun lalu.

Delegasi DPR-RI yang dipimpin oleh Dr. H. Marzuki Alie selaku Ketua Delri diundang menyampaikan presentasi di Sesi 1 dalam penyampaian pemikiran terkait strategi dalam mencapai kolaborasi perdamaian global, dalam hal ini bagaimana menghambat aksi-aksi terorisme bersama dengan Ketua Parlemen Turki dan Ketua Parlemen India. Dalam presentasinya yang berjudul “Strategy for inter-parliamentary collaboration for world peace and anti-terrorism”, Ketua Delegasi Indonesia menegaskan bahwa terorisme tidak dapat dikaitkan dengan salah satu agama tertentu. Dalam konteks ini, Islam tidak pernah mengajarkan tindakan kekerasan seperti terorisme justru sebaliknya bahwa Islam mengajarkan dan menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kasih sayang.

Sidang G-20 Speakers' Consultation dibuka secara resmi oleh H.E. Mr. Park Hee Tae, Speaker of National Assembly of the Republic of Korea pada tanggal 19 Mei 2011. Tema utama persidangan

adalah Development and Growth for Common Prosperity.

Delri yang diketuai DR. H. Marzuki Alie, dan beranggotakan DR. Hidayat Nur Wahid (Ketua BKSAP) dan Ir. Azman Azman Natawijana telah berbagi tugas dalam menjamin partisipasi aktif Delri di tiap-tiap sesi pertemuan, maupun dalam pertemuan-pertemuan bilateral dengan Delegasi-delegasi Parlemen lain.

Sebagai hasil akhir dari persidangan ini telah disepakati sebuah Joint Communique. Delri telah menyampaikan beberapa masukan yang signifikan dalam perumusan Komunique tersebut. Pokok-pokok usulan Delri setelah diintegrasikan dengan masukan dari delegasi lainnya dapat diterima dan masuk dalam 5 paragraf dari 12 paragraf Komunique Bersama tersebut.

Secara garis besar isi Joint Communique G-20 Speakers Consultation ini adalah:

-Pertemuan ini merupakan cerminan dari tanggung jawab Par-

lemen anggota G-20 untuk mencari pendekatan bersama penyelesaian masalah-masalah global yang bertujuan mencapai kesejahteraan bersama dan keamanan global.

-Saat ini dunia menghadapi berbagai masalah yang kompleks, mulai dari krisis ekonomi, kemiskinan, perubahan iklim, kecelakaan nuklir, kejahatan lintas Negara, terorisme, kesenjangan ekonomi dan sebagainya. Untuk itu diperlukan kerjasama yang lebih kuat di antara Parlemen dan Negara-negara anggota G-20 untuk merespons masalah-masalah ini.

-Upaya bersama dalam melawan terorisme berlandaskan prinsip-prinsip dan mekanisme PBB dan ketentuan-ketentuan lain yang telah menjadi kesepakatan internasional.

-Upaya bersama dalam menanggulangi bencana juga memerlukan strategi dan kerjasama internasional.

-Melihat manfaatnya dan agar supaya pembahasan isu-isu internasional yang menjadi kepentingan bersama dapat sejalan antara Pemerintah dan Parlemen negara anggota G-20, maka pertemuan semacam ini disetujui untuk diadakan secara reguler.

-Sidang G-20 Speakers' Consultation yang berikutnya akan diadakan di Arab Saudi tahun 2012. (pressrealese)



Suasan Sidang G-20 di Seoul-Korea Selatan

Kewirausahaan Dalam Rangka Kebangkitan Nasional

Masa ini ditandai dengan peristiwa penting yaitu berdirinya Boedi Oetomo, 20 Mei 1908. Bulan Mei tahun ini, kita memperingati 103 tahun Kebangkitan Nasional. Saya berkeyakinan, bahwa salah satu prioritas dan makna yang perlu dimunculkan dalam rangka Kebangkitan Nasional ini adalah dalam hal entrepreneurship atau kewirausahaan.

Kewirausahaan adalah fenomena penting bagi kemajuan dan kesejahteraan dunia, bahkan telah menjadi pangkal dari pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dibuktikan, misalnya, dari perekonomian Amerika Serikat yang pada tahun 1970-an mengalami stagflasi, dapat bangkit kembali dengan munculnya banyak usaha kecil baru yang mampu mengatasi masalah pengangguran. Untuk itu, tidak berlebihan bila pakar manajemen terkemuka Peter F Drucker, menyebut perekonomian Amerika sebagai entrepreneurial economy.

Sebenarnya definisi kewirausahaan itu cukup bervariasi, tapi di sini kita coba buat definisi kewirausahaan secara umum dan bahasa sehari-hari. Wirausaha adalah usaha, atau bisnis memindahkan segala sumberdaya ekonomi dari wilayah yang kurang produktif ke wilayah yang lebih produktif, agar memperoleh penghasilan yang lebih besar. Pendapat lain, wirausaha adalah kegiatan penciptaan kekayaan dan nilai tambah melalui gagasan, memadukan sumberdaya, dan merealisasikan gagasan tersebut menjadi kenyataan. Wirausaha adalah suatu proses peningkatan kesejahteraan yang dinamis.

Seorang Ilmuwan Amerika bernama David McClelland, pernah menjelaskan bahwa suatu negara disebut makmur jika mempunyai jumlah wirausahawan minimal 2% dari jumlah penduduknya. Namun, saat ini jumlah pengusaha Indonesia hanya 0,24% dari jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk Indonesia sekitar 240 juta, maka ne-

Kebangkitan Nasional adalah masa dimana bangkit rasa semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan, yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan Belanda.

geri ini membutuhkan setidaknya 4,2 juta pengusaha lagi untuk mencapai minimal 2% jumlah usahawan. Hal ini sebenarnya masih minim dibandingkan persentase di negara-negara lain. Sebagai contoh, jumlah pengusaha di Singapura mencapai 7,2% dari jumlah penduduk, Malaysia 2,1%, Thailand 4,1%, Korea Selatan 4%, China dan Jepang 10%, sementara Amerika Serikat 11,5%.

Pengusaha adalah pihak yang secara ekonomis menanggung elemen masyarakat lain yang bukan pengusaha. Jumlah usahawan yang hanya 2% dari jumlah penduduk, artinya terdapat dua orang dari setiap 100 orang penduduk yang membuka lapangan pekerjaan. Ini berarti, 1 orang pengusaha menghidupi 49 orang lain yang bukan pengusaha. Angka ini akan melonjak menjadi 400-an orang yang harus ditanggung oleh seorang pengusaha jika saat ini baru terdapat 0,24% penduduk Indonesia yang menjadi wirausahawan. Jumlah ini tentu sangat kurang sebanding, dan menunjukkan beratnya penduduk yang harus ditanggung para pengusaha kita. Untuk itulah, kita perlu membangkitkan jiwa kewirausahaan dan memulai sebuah bisnis (entrepreneur) yang mampu menanggung kehidupan diri dan kehidupan masyarakat.

Pemerintah kita telah menargetkan jumlah pengusaha di tanah air mencapai 2% dari jumlah penduduk. Salah satu upaya pemerintah mewujudkan kekuatan perekonomian itu adalah melalui Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN). Program ini diusung Kementerian Koperasi dan UKM pada 2 Februari 2011, dengan harapan untuk makin menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Menteri Koperasi



juga berharap banyak kepada generasi muda agar mengembangkan dunia wirausaha yang berskala nasional dan internasional.

Entrepreneurship menjadi penting karena pengusaha pulalah yang menjadi ujung tombak perekonomian suatu negara. Merekalah yang memimpin dan menentukan jalan usahanya sesuai bidang industri masing-masing, yang sebetulnya ikut menentukan arah pergerakan ekonomi dan industri. Di negara-negara maju yang jumlah persentase pengusahanya tinggi, menunjukkan bahwa inovasi atau perkembangan usahanya bisa sangat cepat terjadi. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh aktifitas dan kreatifitas pengusaha.

Disamping memiliki posisi yang sangat strategis bagi negara, entrepreneurship juga penting sebagai bentuk nyata seorang pemimpin. Hal ini karena pengusaha berinteraksi dengan para karyawannya, orang yang dipimpinnnya dalam menjalankan setiap usahanya. Dibandingkan dengan

memimpin organisasi atau lembaga non-profit, memimpin karyawan memiliki tantangan tersendiri, karena karyawan dibayar untuk melakukan pekerjaannya. Disinilah tantangan kepemimpinan itu diuji, apakah karyawan menuruti pengusaha hanya untuk menerima gaji, atau karyawan memang melakukan apa yang diminta oleh pengusaha dengan tulus untuk mencapai tujuan perusahaan.

Selain itu, pengusaha memiliki kelebihan, karena dia secara langsung, mampu memberikan manfaat bagi sesamanya. Ia menghidupi para karyawannya, memberikan keuntungan kepada klien bisnisnya dan juga supplier usahanya. Lebih lanjut lagi, ia mampu memberikan inspirasi bagi

banyak orang untuk turut memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk sesamanya.

Bagi Indonesia, dengan kecilnya jumlah wirausaha, maka kewirausahaan menjadi keharusan. Seperti disebutkan di atas, bahwa suatu negara dapat berkembang secara ideal jika wirausahanya sudah mencapai 2% dari jumlah penduduk. Wirausaha yang dimaksud adalah yang sesuai dengan kriteria wirausaha dengan motivasi berprestasi yang tinggi, kreatif, dan memiliki kemampuan berinovasi, serta mampu menciptakan perubahan dan kompetisi pada pasar. Mereka mampu meningkatkan produktivitas sejalan dengan munculnya inovasi-inovasi baru dalam teknologi, barang, maupun

jasa. Kemudian, perubahan serta kompetisi pada pasar dapat terjadi karena adanya inovasi yang membuat pelaku pasar lainnya bersaing secara sehat. Wirausaha seperti itulah yang seharusnya ditumbuhkan dan dikembangkan di Indonesia, supaya menjadi negara maju. Untuk itu, perlu partisipasi dan sinergi dari pemerintah-pendidikan bisnis masyarakat.

Harapan terhadap munculnya entrepreneur ini merupakan sesuatu hal yang relevan untuk diwujudkan pada hari Kebangkitan Nasional, bulan Mei ini. Mudah-mudahan dalam waktu 5-10 tahun mendatang, Indonesia maju sebagai negara yang bangkit sebagai entrepreneurial economy.* (parle)foto: internet

Permintaan Informasi mayoritas berada di AKD

Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Helmizar mengatakan, permintaan informasi mayoritas berada di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) seperti permintaan laporan kunjungan kerja luar negeri, risalah rapat, draft UU, dan sebagainya. Keterlambatan mendapatkan informasi tersebut seringkali menjadi persoalan di tubuh PPID.



Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Helmizar.

Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Helmizar mengatakan, permintaan informasi mayoritas berada di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) seperti permintaan laporan kunjungan kerja luar negeri, risalah rapat, draft UU, dan sebagainya.

Keterlambatan mendapatkan informasi tersebut seringkali menjadi persoalan di tubuh PPID.

“Tanggung jawab berada di tangan AKD karena itu bila informasi tidak sampai ke PPID tentu akan menyulitkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),”kata Ketua PPID yang juga merupakan Kepala Biro Humas dan Pemberitaan saat menyampaikan sosialisasi layanan informasi publik di gedung DPR, ruang Pansus B, Jumat, (27/5).

Menurutnya, selaku PPID yang ditunjuk berdasarkan UU KIP harus memiliki badan pengelola informasi. Humas, lanjutnya, juga sudah mencoba mengirim surat permintaan kepada AKD agar mempublikasikan kunjungan kerja mereka di website sehingga lebih mudah dan murah serta mudah di akses.

Sebagai peraturan pelaksana UU KIP, DPR telah membuat aturan No. 1 tahun 2010 yang mengatur informasi terkait Informasi yang dapat di publikasikan dan tidak boleh dipublikasikan.

PPID, lanjutnya, dibatasi permintaan mendapatkan informasi selama 10 hari yang harus disiapkan. Sementara kendalanya AKD seringkali bisa 14 hari ataupun 1 bulan. “Kita bisa 7 hari menunda, jika aturan bakunya sudah disampaikan maka menjadi tanggung jawab AKD untuk menyiapkan informasi tersebut,”paparnya.

Dia menambahkan, seluruh informasi kunjungan kerja keluar negeri yang selama ini menjadi polemik seharusnya langsung dimasukkan didalam website dpr.go.id. “Website layanan informasi terbuka siapa saja yang ingin meminta informasi,”jelasnya.

Menurutnya, DPR mempunyai hak menolak bila tidak dipublikasikan apabila informasi tersebut dianggap melanggar UU. (si)foto:doc parle

Pengaduan Online Upaya Sempurnakan Sistem Pengaduan

“Saya ingin adanya perubahan di masyarakat karena selama ini pengaduan sedikit karena memang gatenya banyak sehingga tidak direcord bahkan saya tanya kepada bu sekjen mengapa laporan pengaduan masyarakat ujungnya dimana,” tanyanya saat Launching website Layanan Informasi Publik, sms pengaduan maupun websitenya, di Gedung Operatioan Room, Senin, (23/5).

Dia mengatakan, sebelumnya dirinya sudah meminta Ibu sekjen DPR, agar segera membuat laporan masyarakat sehingga sesuai dengan semangat slogan “masyarakat mengadu DPR merespons”

“Melalui sistem informasi maka aspirasi dapat disampaikan melalui berbagai pintu, bisa melalui surat, datang langsung, sms maupun dengan website. Jadi orang papua tidak perlu datang untuk mengadu,” jelasnya.

Yang melapor, terangya, bisa mengikuti sejauhmana respons DPR karena ada disposisi ke Komisi-komisi. “Kita bangun sistem dan subsistemnya. Setelah itu sosialisasi kepada alat kelengkapan dan itu merupakan suatu kewajiban, respons jelas langsung masuk database,” Paparnya.

Kita, lanjutnya, harus mendorong digalakkannya sosialisasi dengan mengundang alat kelengkapan sehingga ada yang respons.

“kita dorong DPR ini dengan sistem sehingga ada malunya karena DPR ini

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan launching webiste layanan informasi publik, sms pengaduan maupun websitenya merupakan upaya DPR dalam menyempurnakan sistem yang ada.



Ketua DPR RI saat men-launching website layanan informasi publik yang didampingi oleh Sekjen DPR RI Nining Indra Saleh (kanan)

merupakan pilar demokrasi makanya harus dipastikan tetap berdiri tegak dan terbangunnya sistem check and balances,” katanya.

Di era demokrasi sekarang ini media selalu menghantam DPR karena itu kita harus maju dengan argumentasi yang pintar dan cerdas.” Segera panggil sekretariat alat kelengkapan yang tidak melaksanakan pecat saja bu sekjen,” ujarnya.

Ini perlu waktu dan komitmen kita

dalam menghadapi zaman. “Layanan informasi publik online merupakan langkah DPR menghadapi keterbukaan jadi ada hak publik yang harus diberikan oleh DPR,” papar Marzuki.

Dia menambahkan, petugas layanan informasi publik harus paham aturan dan UU sehingga dapat memberikan penjelasan yang tepat kepada peminta informasi seperti LSM.

Dia menjelaskan hal tersebut merupakan tekad DPR sebagai bentuk representasi dan mendekatkan diri dengan masyarakat. “Ini bukti reformasi yang kita lakukan kita sadari betul lemahnya DPR ini bagian kecil konsep besar dalam melakukan perubahan bagi DPR,” ujarnya.

Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan masyarakat dapat mengakses <http://pengaduan.dpr.go.id>, dan dapat mengirim SMS aspirasi DPR RI ke 08119443344. Sementara untuk pelayanan informasi publik online DPR RI dapat mengakses, <http://ppid.dpr.go.id>. (si)/foto:iw/parle.



Episode 6 **Managing
The Nation (MTN)**



**Ketua DPR RI,
DR. H. Marzuki Alie**

**Kamis, 9 Juni 2011
Jam 19.30-20.30**



di **METRO**  **TV**